

# MODEL IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DESA BERBASIS WEB BAGI PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN SIDOARJO

**Diana Hertati**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
*e-mail : DianaHertati.DH@gmail.com*

## ABSTRAK

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa diperlukan adanya sistem informasi berbasis web. Penelitian ini dilakukan karena terdapat indikasi pengelolaan keuangan desa yang masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah, terutama pada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan merupakan eksekusi dari rencana yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, kualitas pada tahap pelaksanaan mempengaruhi tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model implementasi sistem informasi pemerintahan desa berbasis web. Penelitian dilakukan pada dua desa dan dua wilayah Kecamatan yaitu desa Tambak Oso Kecamatan Waru dan desa Sedati kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan interview, focused group dan discussion. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Kajian ini menemukan bahwa pengelolaan keuangan pemerintahan desa baik di Desa Tambak Oso maupun Segoro Tambak sudah menggunakan aplikasi Siskeudes baik online maupun offline, selain memiliki tampilan yang mudah digunakan, juga dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan implementasi maupun manual aplikasi, mengingat penggunaannya memiliki rentang kemampuan yang berbeda-beda, seperti ditemukan bahwa Desa segoro Tambak belum mewujudkan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel dibandingkan desa Tambak Oso serta belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan. Beberapa kendala yang dihadapi desa Segoro Tambak, di antaranya belum efektifnya pembinaan terhadap aparatur desa, Aplikasi siskeudes ini juga dibangun dengan *built-in internal control* sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi juga dapat diminimalisir. Dan hal yang sangat ditekankan, aplikasi ini dapat diperoleh secara “gratis” oleh pemerintah desa. Namun.

**Kata Kunci :** *Model Implementasi, Sistem informasi, Pemerintahan Desa, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Tonggak baru negara dengan sistem pembangunan *bottom-up* ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Azhar, 2015). Undang-Undang Desa memberikan kedudukan kepada desa untuk lebih diakui dan memberikan payung hukum kuat terhadap eksistensi desa (Ismadani, 2015) dan desa akan menjadi subyek pemerintahan (Hoesada, 2014). Otonomi daerah sebagai

pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengurus wilayahnya sendiri secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel dengan berbagai karakteristik dan potensi-potensi yang ada di setiap wilayah Indonesia (Manan, 2005). Desa memiliki batas-batas wilayah yang diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya tanpa meninggalkan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan (Risadi, 2015). Dalam

Undang-Undang Desa telah memberikan kewenangan yang sangat besar kepada desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri dengan tujuan untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa (Fauzi, 2015).

Dengan adanya berbagai wewenang yang ada pada pemerintah desa untuk membuat kebijakan-kebijakan, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya sendiri, sehingga menjadikan kewenangan desa tersebut sangat penting untuk dilakukan dengan tepat dengan berbagai pendapatan yang diterima oleh desa. Keterbatasan sumber daya dan sumber pembiayaan tentunya menjadi salah satu penghambat pemerintahan desa dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi desa tersebut. Oleh sebab itu muncul gagasan pemerintah untuk membantu pemerintah desa dengan memberikan bantuan dana desa melalui Dana Desa (DD) (Thomas, 2013,hal.1). Dalam melaksanakan otonomi daerah dibidang keuangan, prinsip "*money should follow function*" membawa konsekuensi pada penyerahan anggaran (Bahl, 1999). Hal ini berlaku untuk pengelolaan keuangan dana desa menjadi kewenangan desa yang diatur dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Pengelolaan keuangan dana desa menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa

Saat ini perkembangan teknologi informasi memberikan banyak kemudahan bagi pemerintahan desa untuk menyediakan informasi secara lebih cepat, lengkap dan berkualitas. Untuk meningkatkan layanan informasi bagi pemerintahan desa salah satu terobosannya adalah dengan menggunakan sistem informasi berbasis web, yang bermanfaat untuk mendukung transparansi

sistem akuntabilitas penggunaan dana desa agar pengawasan pembangunan desa akan semakin jelas dan tepat sasaran dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Melalui Sistem pengelolaan keuangan dana desa kondisi dan sektor-sektor yang menjadi potensi unggulan desa dapat didokumentasikan dan di kedepankan dengan baik. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Indah Kurnia, dari Komisi XI DPR RI, mengatakan bahwa :

“Kegiatan workshop Siskeudes tersebut agar dimanfaatkan dengan baik oleh para Kades di Kabupaten Sidoarjo. Sebab dari sejumlah temuan, masih ada Kades yang ternyata masih belum paham. Kelihatan remeh tapi akan jadi masalah besar. Sedangkan dari Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Hari Purwaka, dari Siskeudes masih ditemukan laporan keuangan yang kurang pertanggung jawaban. Dari hasil temuan, maka Desa harus memperbaiki pengelolaan keuangan desa” (<http://harian bhirawa.com>, diakses tanggal 8 Juli 2019)

Berdasarkan hasil penelitian tahun pertama menunjukkan bahwa terdapat beberapa manfaat dalam penggunaan sistem informasi berbasis Web untuk pengelolaan dana desa, yaitu mempermudah penggunaan dan pengawasan dana desa baik di desa Segoro Tambak maupun Desa Tambak Oso dan membantu dan memperbaiki metode pengalokasian dana desa sehingga sasaran penggunaan dana desa semakin jelas; sedangkan dalam persepsi tentang kemudahan penerapan system menunjukkan bahwa dengan diterapkannya sistem informasi pemerintahan desa berbasis web, kondisi realitas yang ada baik di desa Segoro Tambak maupun Tambak Oso masih belum mendapatkan kemudahan; Ketersediaan sumber daya manusia yang potensial dan

kompeten masih belum cukup memadai tetapi akan diupayakan terus untuk mencukupinya. Ketersediaan dukungan system dan infrastruktur akan diupayakan pengadaannya oleh pemerintah desa; Terakhir hasil penelitian ditemukan bahwa strategi adopsi sistem informasi pemerintah desa berbasis web melalui tiga indikator, yaitu input, proses dan output.

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian tahun pertama tersebut diatas, maka perlu dikaji tentang Model Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Berbasis Web Bagi Pemerintahan Desa Di Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis model implementasi sistem informasi pemerintahan desa berbasis web.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Otonomi Desa**

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah (Widjaja, 2003: 165). berdasarkan hak istimewa, Desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan karena sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan "Development Community" dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai "Independent Community" yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan

masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

### **2. Desa**

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kartohadikusumo (2014) juga menyebutkan bahwa desa merupakan suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang rendah dan dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen. Selain itu, penduduknya bermatapencarian di bidang agraris serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya. Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (HAW. Widjaja, 2003: 3).

### **3. Keuangan desa**

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Hak. Kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa (UU No 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1 dan 2).

Pendapatan Desa: bersumber dari: a) pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa, b) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, d) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g) lain-lain pendapatan Desa yang sah (Pasal 72). Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

#### 4. Sistem Informasi

Menurut Havery (2006) mengatakan bahwa Sistem adalah: Prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan Jogiyanto, 2005 menyampaikan bahwa Informasi diartikan sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Menurut leitch dan Davis dikutip Jogiyanto (2005) menyatakan

bahwa Sistem Informasi merupakan suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Menurut Kristarnto (2008:13) Komponen-komponen yang ada dalam sistem informasi meliputi beberapa blok, yaitu : (1) Blok Masukan (*Input*); blok masukan ini mewakili data yang masuk kedalam sistem informasi. Input disini termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar; (2) Blok Model; blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model matematika yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. (3). Blok Keluaran (*Output*); produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkat manajemen serta semua pemakai sistem. (4) Blok Teknologi; teknologi merupakan alat yang digunakan untuk menerima masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Teknologi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu teknisi, perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware). (5) Blok Basis Data; basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan diperangkat keras komputer, basis data diakses atau dimanipulasi dengan menggunakan paket perangkat lunak yang disebut database manajemen sistem

(DBMS). (6) Blok Kendali; beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem bisa dicegah ataupun bila terlanjur terjadi kesalahankesalahan dapat langsung cepat diatasi.

### 5. Model Implementasi Kebijakan

Perkembangan implementasi kebijakan, terdapat dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni pendekatan Top-Down dan Bottom Up. Pendekatan yang bersifat top-down dipakai untuk mengklasifikasikan para peneliti yang menggunakan logika berfikir dari 'atas' kemudian melakukan pemetaan 'ke bawah' untuk melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Menurut Nugroho (2014:680) model "top-downer" mudahnya ialah berupa pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat, dimana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi. Sedangkan pendekatan bottom-up menggunakan logika berfikir dari 'bawah ke atas' dan menekankan pentingnya memperhatikan dua aspek penting dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu birokrat pada level bawah (street level bureaucrat), dan kelompok sasaran kebijakan. Model "bottom-upper" bermakna meski kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaan oleh rakyat.

Beberapa model implementasi kebijakan dari beberapa para ahli diantaranya yaitu Model Charles O.Jones. Menurut Jones (1996:296) ketiga aktivitas tersebut dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu : (1) Organisasi : Setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang

jelas, (2) Interpretasi : Mereka yang bertanggungjawab dapat melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku begitu dengan pelaksanaannya, apakah telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, (3) Aplikasi (penerapan). Peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan untuk dapat melihat ini harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan disiplin.

### 6. Metode Prototype untuk Pengembangan Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan struktur sistem yang sangat kompleks yang dibangun berdasarkan tujuan khusus untuk mendukung kegiatan suatu organisasi. Setiap proses pengembangan sistem memerlukan suatu kerangka yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan memantau kemajuan proses pengembangan sistem pada setiap tahap dalam pengembangan sistem (Issaia P and Isaaias, 2015). Kemudian Ogedebe, dkk (2012), menyampaikan bahwa prototyping merupakan metode pengembangan perangkat lunak, yang berupa model fisik kerja sistem dan berfungsi sebagai versi awal dari sistem. Dengan metode prototyping ini akan dihasilkan prototype sistem sebagai perantara pengembang dan pengguna agar dapat berinteraksi dalam proses kegiatan pengembangan sistem informasi.

Model waterfall, model iteratif waterfall, model prototype dan model spiral merupakan beberapa metode yang dapat digunakan dalam pengembangan sistem

informasi. Setiap pengembang sistem akan menggunakan model yang dianggap sesuai dan tepat untuk proyek yang akan dikembangkannya. Tahap dasar setiap metode dalam pengembangan sistem adalah sebagai berikut :: a) penentuan kebutuhan sistem, b) disain Sistem, c) pengembangan kode /program dan d) pengujian sistem (Maheswari and Jain, 2012).

Siklus pengembangan sistem menggunakan metode Propyotype menurut Carr and Verner (1997) meliputi empat tahap kegiatan, yaitu : a) identifikasi dan analisis kebutuhan pengguna. B) mengembangkan prototype, c) pengujian dan Umpan Balik Oleh Pengguna dan d) merilis Sistem Final.

## **METODE PENELITIAN**

Subyek Penelitian dan Obyek Penelitian ini adalah Kantor Desa Tambak Oso dan Desa Segoro Tambak Kabupaten Sidoarjo. Instrumen Penelitian Informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang pengelolaan keuangan dan kekayaan desa, yaitu Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Kepala seksi, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada dipermerintah Desa Tambak oso dan Segoro Tambak.

Sumber Data dan Jenis Data Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : Data primer yang merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari informan melalui Interview maupun observasi berupa identitas responden dan hasil tanggapan responden tentang bagaimana pengelolaan keuangan dan kekayaan di ke dua Desa. Sedangkan Data sekunder yaitu data pendukung yang di peroleh dari dokumen, buku-buku, serta hasil-hasil penelitian

lainnya yang berkenaandengan penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalag *indepth interview* dan *Focus Group Discussion* (FGD). Wawancara mendalam (*Indepth Interview*) dilakukan agar didapat gambaran yang lengkap dan utuh terkait dengan aplikasi sistem informasi pemerintahan desa berbasis web, bagi pemerintahah desa Tambak Oso dan Desa Segoro Tambak Kabupaten Sidoarjo. Diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*) digunakan dengan pertimbangan karena intensitas persoalan dan prospektifnya baru akan ditemukan secara akurat jika informan dilibatkan secara kognitif dan emosional dalam forum atau kesempatan terarah. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang pandangan, persepsi dan sikap tentang pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes.

Selanjutnya Teknik Analisa Data Penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan metode kualitatif dengan mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh dan nyata mengenai model implementasi sistem informasi pemerintahan desa berbasis web.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara terhadap pimpinan dan staf Desa Tambak Oso dan Desa Segoro Tambak didapatkan informasi bahwa model implementasi sistem informasi pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan sudah menggunakan aplikasi Siskeudes baik online maupun offline, selain memiliki tampilan yang mudah digunakan, juga dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan implementasi maupun manual aplikasi, mengingat penggunaanya memiliki rentang

kemampuan yang berbeda-beda, seperti dalam temuan riset yang dilakukan bahwa Desa segoro Tambak belum mewujudkan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel dibandingkan desa Tambak Oso serta belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan. Beberapa kendala yang dihadapi desa Segoro Tambak, di antaranya belum efektifnya pembinaan terhadap aparatur desa, Aplikasi siskeudes ini juga dibangun dengan *built-in internal control* sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi juga dapat diminimalisir. Dan hal yang sangat ditekankan, aplikasi ini dapat diperoleh secara “gratis” oleh pemerintah desa.

Kebutuhan akan kegiatan pengolahan data dan penyajian informasi dalam pengelolaan keuangan desa tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan sebuah sistem informasi berbasis teknologi informasi (web). Hal ini sesuai dengan pendapat Havery (2006) yang mengatakan bahwa Sistem adalah: Prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Kemudian juga dipertegas oleh Jogiyanto, 2005 menyampaikan bahwa Informasi diartikan sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.

Penerapan sistem teknologi informasi berbasis web akan bermanfaat jika penerapannya sesuai dengan tujuan, visi dan misi organisasi sehingga dibutuhkan suatu analisis berbagai faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu perencanaan strategi sistem atau teknologi informasi yang sesuai dan selaras dengan kebutuhan pengelolaan keuangan desa yaitu dengan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes).

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Model implementasi sistem informasi pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan sudah menggunakan aplikasi Siskeudes baik online maupun offline.
- b. Desa segoro Tambak belum mewujudkan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel dibandingkan desa Tambak Oso serta belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan.
- c. Beberapa kendala yang dihadapi desa Segoro Tambak, di antaranya belum efektifnya pembinaan terhadap aparatur desa, Aplikasi siskeudes ini juga dibangun dengan *built-in internal control* sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi juga dapat diminimalisir.

### Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, diusulkan beberapa saran yaitu :

- a. Desa Segoro Tambak agar lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel.
- b. Perlu adanya pembinaan terhadap aparatur desa yang terkait dengan dengan pengelolaan keuangan desa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, D.F dan Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 12 Nomor 2, Januari 2013: 94-103
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu. Makassar.
- Bayo-Moriones, A, Galdon-Sanchez, J.E.

- and Martinez-de-Morentin, S., 2011, Performance Appraisal : Dimension s and Determinants, IZA Discussion Paper No 5623, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of labor, Bonn, Germany, April 2011.
- Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum, Yogyakarta, 2005.
- Bachrein, S. (2010). Pendekatan desa membangun di Jawa Barat: strategi dan kebijakan pembangunan perdesaan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* Volume 8 No.2, Juni 2010: 133-149
- Bukhari. 2012, Sistem pemerintahan desa. <http://bukharistyle.blogspot.com/2012/01/sistem-pemerintahan-desa.html>.
- Carr, M., & Verner, J. (1997). Prototyping and software development approaches. Department of Information Systems, Hong Kong: City University of Hong Kong.
- Dura, J. (2016). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat (studi kasus pada desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal Jibeka* Volume 10 Nomor 1 Agustus 2016 hal 26 – 32.
- Earl, M.J., 1989. Management Strategies for Information Technology. Prentice Hall, Hemel Hempstead.
- Jogiyanto. M.M. 2007. Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi. Yogyakarta: Andi
- Jan Kooiman, 2003, Governing as Governance, SAGE
- Kumar, N., Zaggaonkar A.S. and Shukla A., 2013, Evolving a New Software Development Life Cycle Model (SDLC-2013 with Client Satisfaction, *International Journal of Soft Computing an Engineering*, Vol 3 Issue 1, March 2013, p 216-221
- Maheswari, S. And Jain, D.Ch. 2012, a Comparative Analysys of Different Types of Models in Software Development Life Cycle, *International Journal of Advaced Research in Computer Science and Software Engineering*, Vol 2, Issue 5, 2012, p 285-290.
- Mahmudi, (2013), Manajemen Kinerja Sektor Publik. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo, (2004), Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta.
- Machfud, S., Mahi, B.R., Simanjutak, R., dan Brojonegoro, B. (2002). Dana alokasi umum konsep hambatan dan prospek di era otonomi daerah, Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2002). Otonomi daerah dan manajemen keuangan daerah. Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, I. (2000). Pengembangan ekonomi pedesaan menyongsong otonomi daerah. *Analisis CSIS*, XXIX(1):102-114. Jakarta: CSIS.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Ogedebe, P.M., & Jacob, B.P. , 2012, Software Prototyping: A Strategy to Use When User Lacks Data Processing Experience. *ARNP Journal of Systems and Software*. VOL. 2, NO.6 , 2012, [http://scientificjournals.org/journal\\_of\\_system\\_and\\_software/-archive/vol\\_2\\_no\\_6/vol\\_2\\_no\\_6\\_4.pdf](http://scientificjournals.org/journal_of_system_and_software/-archive/vol_2_no_6/vol_2_no_6_4.pdf).
- Sabale, R., & Dani, A. (2012). Comparative study of prototype model for software engineering with system development Life Cycle. *IOSR Journal of Engineering*, 2(7), 21–24.
- Sedarmayanti. 2012. Good Governance “Kepemerintahan yang Baik. Bagian Kedua Edisi Revisi. CV Mandar Maju. Bandung
- Thomas.2013, ”Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana

Tidung”, eJurnal Pemerintahan Integratif. Volume 1, Nomor 1, Hal. 51-64.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah memberikan

PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

<http://www.springer.com/978-1-4614-9253-5>, 2015, Issaia P and Isaiias T, High Level Models and Methodologies for Information Systems, diakses 16 Januari 2015.